

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Melinda Sari Siregar  
150810094**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Melinda Sari Siregar  
150810094**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Melinda Sari Siregar  
NPM/NIP : 150810094  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, Agustus 2019

**Melinda Sari Siregar**  
150810094

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Melinda Sari Siregar  
150810094**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, Agustus 2019**

**Neni Marlina Br.Purba, S.Pd., M.Ak.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, dengan menggunakan populasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 60 sampel. Data yang digunakan adalah data selama lima tahun, mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan menggunakan uji t, uji F dan uji asumsi klasik. Dengan hasil uji kolmogorov-smirnov data yang berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, namun pada variabel retribusi daerah diperoleh bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uji F juga diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Batam. Dengan nilai koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Batam sebesar 83,3 % dan sisanya sebesar 16,7 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## **ABSTRACT**

*Regional Original Income (PAD) is income that is sourced and collected by the Regional Government. Source of PAD consists of Regional Taxes, Regional Levies, Profits from Regionally-Owned Enterprises (BUMD) and other legitimate Regional Revenues. One of the biggest sources of Regional Original Income (PAD) is Regional Tax and Regional Retribution. This study aims to determine how the influence of regional taxes and regional retribution on increasing PAD. In this study the data used is secondary data issued by the Regional Tax and Retribution Management Agency of the City of Batam, using a population of Regional Taxes, Regional Retributions and Regional Original Income (PAD) of 60 samples. The data used are data for five years, starting from 2014 to 2018. The analysis technique used is multiple linear regression, using the t test, F test and classic assumption test. With the results of the Kolmogorov-Smirnov test the data are normally distributed. Based on the results of the hypothesis test, it was found that the regional tax variable had a positive effect on local revenue, but in the variable regional levies it was found that regional retribution did not have a positive effect on the original income. Based on the results of the F test it is also known that regional taxes and regional retributions together have a positive and significant influence on the original income of the area in the city of Batam. With a coefficient of determination that shows that the influence of regional taxes and regional levies on local revenue in the city of Batam is 83.3% and the remaining 16.7% is influenced by other variables outside of this study.*

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Retribution, Regional Original Income (PAD)*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat penulis untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar Sarjana pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam dengan judul “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Neni Marlina Br.Purba, S.Pd., M.Ak. selaku pembimbing skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang sangat banyak membantu dan begitu sabar mengarahkan penulis.
5. Kepada seluruh dosen Universitas Putera Batam khususnya prodi Akuntansi yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staff Universitas Putera Batam.
7. Pimpinan dan staff Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
8. Kedua orang tua saya tercinta yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan dan memberikan seluruh kasih sayang dari sejak kecil hingga saat ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang mendukung.
10. Kepada seluruh rekan mahasiswa/I program studi Akuntansi kampus Tembesi atas kebersamaan, keceriaan, dan kerjasamanya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
12. Terima kasih untuk kak Ronida, kak Annisa, Lolita dan Asrina selalu membantu dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk yang sudah mau menemani dan menyemangati saat penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Putera Batam untuk masa yang akan datang.

Batam, Agustus 2019

Melinda Sari Siregar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RUMUS .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2. Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Kajian Teori.....	11
2.1.1. Pajak Daerah.....	11
2.1.2. Retribusi Daerah.....	13
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
2.4. Hipotesis.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Desain Penelitian.....	23
3.2. Operasional Variabel.....	24
3.2.1. Variabel Independen (Variabel bebas).....	24
3.2.2. Variable dependen (Variabel terikat).....	25
3.3. Populasi dan sampel.....	25
3.3.1. Populasi.....	25
3.3.2. Sampel.....	25
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4.1. Alat Pengumpulan Data.....	27
3.5. Analisa Data.....	27
3.5.1. Analisis Deskriptif.....	27
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	27

3.5.3.	Uji Pengaruh .....	30
3.5.4.	Uji Hipotesis .....	31
3.5.5.	Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	35
4.1.1.	Analisis Deskriptif .....	35
4.1.2.	Hasil Uji Normalitas Data .....	36
4.1.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	39
4.1.4.	Uji Pengaruh .....	42
4.1.5.	Uji Hipotesis .....	43
4.2.	Pembahasan .....	46
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>49</b>
5.1.	Simpulan .....	49
5.2.	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b> Kerangka Pemikiran .....	21
<b>Gambar 3. 1</b> Desain Penelitian .....	24
<b>Gambar 4. 1</b> Uji Normalitas Histogram.....	37
<b>Gambar 4. 2</b> Uji Normalitas P-P Plot .....	37

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b>	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2014-2018 .....	6
<b>Tabel 2. 1</b>	Penelitian Terdahulu.....	19
<b>Tabel 3. 1</b>	Jadwal Penelitian .....	34
<b>Tabel 4. 1</b>	Hasil Analisis Deskriptif .....	35
<b>Tabel 4. 2</b>	Hasil Uji Normalitas- <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	38
<b>Tabel 4. 3</b>	Hasil Uji Multikolinieritas .....	39
<b>Tabel 4. 4</b>	Hasil Uji Autokorelasi.....	40
<b>Tabel 4. 5</b>	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Spearman's Rho</i> .....	41
<b>Tabel 4. 6</b>	Hasil Uji Heterokedastisitas <i>Park Glejser</i> .....	41
<b>Tabel 4. 7</b>	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	42
<b>Tabel 4. 8</b>	Hasil Uji t (Uji Regresi Parsial) .....	43
<b>Tabel 4. 9</b>	Hasil Uji F (Uji Simultan).....	45
<b>Tabel 4. 10</b>	Hasil Uji $R^2$ (Koefisien Korelasi).....	46

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus 2. 1</b> Pajak Daerah .....	13
<b>Rumus 2. 2</b> Retribusi Daerah .....	16
<b>Rumus 3. 1</b> Regresi Linier Berganda .....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Data Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	53
<b>Lampiran 2</b> Data Hasil Olahan SPSS 21 .....	56
<b>Lampiran 3</b> t Tabel .....	61
<b>Lampiran 4</b> F Tabel .....	65
<b>Lampiran 5</b> Tabel DW .....	68
<b>Lampiran 6</b> Daftar Riwayat Hidup .....	71
<b>Lampiran 7</b> Surat Keterangan Penelitian .....	72
<b>Lampiran 8</b> Surat Balasan Penelitian .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, yang masing-masing adalah provinsi atau kota di mana setiap provinsi atau kota memiliki pemerintah daerah. Di banyak bagian Indonesia, pemerintah pusat didefinisikan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 untuk memfasilitasi layanan dan tata kelola karena sulit bagi pemerintah pusat untuk mengatur pemerintah yang ada. Prinsip sentralisasi telah diubah menjadi desentralisasi. Realisasi kebijakan desentralisasi dengan lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Otoritas Daerah No. 22 tahun 1999 tidak lagi tepat waktu, sehingga implementasi pemerintahan mandiri lokal saat ini diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 dan 12 tahun 2008 Telah diganti Tentang pemerintah daerah

Otonomi daerah memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola kepentingan lokalnya. Ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap masalah pembiayaan dalam bentuk pajak daerah dan pajak daerah agar dapat mendistribusikan hasil pajak daerah dan pendapatan pajak daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengakses masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945 Pemerintah daerah menerapkan pemerintahan sendiri dengan menerapkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya, baik sumber daya

manusia dan ekonomi lokal. Perlakukan sumber daya potensial dan nirlaba di wilayah itu sendiri untuk menghindari kesenjangan dan menciptakan stabilitas ekonomi dan kapasitas kinerja ekonomi regional. Karena otonomi daerahnya yang luas, realistis, dan akuntabel, setiap daerah harus menggunakan sumber daya lokalnya untuk memenuhi kebutuhan publik.

Sumber pendapatan daerah adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ketika PAD meningkat, pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana, meningkatkan kemandirian daerahnya, mempromosikan ekonomi dan pembangunan lokal, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan publik secara umum. Salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka adalah dengan meningkatkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD, pemerintah perlu menambah beberapa pos tertentu, seperti pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang pemerintah daerah menetapkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi setempat. Setiap daerah diizinkan untuk mempelajari, memproses, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan peluang lain untuk meningkatkan PAD. Pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD, Pemerintah Kota Batam berusaha untuk mencapai tujuan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak daerah untuk meningkatkan PAD yang dapat digunakan untuk membiayai masalah daerah secara terus menerus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah dan fungsinya mengukur sejauh mana otonomi ini dipraktikkan secara luas dan dilaksanakan

secara bertanggung jawab. Dengan penggalan terbesar dan peningkatan PAD, diharapkan pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas pelaksanaan urusan daerah (Sugiyono, 2016). Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terpenting. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penting pendapatan daerah untuk membiayai operasi pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendapatan pajak dan retribusi daerah harus berkontribusi positif bagi PAD dalam hal mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah didefinisikan sebagai penyediaan layanan atau izin khusus yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan (Darise, 2009). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan pemerintahan daerah. Dalam retribusi daerah termasuk retribusi daerah jasa dan retribusi daerah langsung yang mungkin ditentukan. Misalnya, pajak pasar dibayarkan ketika pembayar menggunakan ruang pasar tertentu.

Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau. Batam adalah kota dengan lokasi yang strategis. Kota Batam tidak hanya berada di jalur pelayaran internasional, tetapi juga sangat dekat dan terhubung langsung ke Singapura dan Malaysia. Sebagai kota yang direncanakan, Batam adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Menurut Keputusan Presiden 41 tahun 1973, Pulau Batam didukung oleh Biro Pengembangan Industri Pulau Batam dengan tujuan awal pembuatan Pulau Batam di Singapura pada tahun 1970-an. . Batam

adalah tempat yang sangat strategis dan salah satu kota industri. Batam dapat menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang signifikan dari pajak perusahaan, komersial, hotel dan restoran.

Menurut data yang didapat dari laporan APBD, di tahun 2014 target dari pajak daerah sebesar Rp 289.366.315.500 dan realisasi dari pajak daerah sebesar Rp 580.864.691.714,45 serta target dari retribusi daerah di tahun 2014 sebesar Rp 77.112.523.550,00 dan realisasinya sebesar Rp 86.504.461.948,55. Target dari pajak daerah di tahun 2015 sebesar Rp 610.646.128.524,94 dan realisasi dari pajak daerah sebesar Rp 614.910.861.602,42 serta target retribusi daerah di tahun 2015 sebesar Rp 86.830.212.368,00 dan realisasinya sebesar Rp 84.459.384.009,83. Di tahun 2016 target pajak daerah sebesar Rp 675.354.068.401,00 dan realisasi dari pajak daerah sebesar Rp 648.110.809.097,03 serta realisasi dari retribusi daerah sebesar Rp 89.399.975.133,53 dan realisasinya sebesar 93.194.628.136,59. Tahun 2017 target pajak daerah sebesar Rp 738.223.364.310,00 dan realisasi sebesar Rp 648.218.537.854,87 serta target dari retribusi daerah sebesar Rp 100.420.079.968,00 dan realisasinya sebesar Rp 91.582.658.447,25. Tahun 2018 target dari pajak daerah sebesar Rp 937.572.399.745,60 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp 845.697.306.042,89 serta target retribusi daerah sebesar Rp 123.605.840.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 94.570.998.976,00.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah di kota Batam. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaporan keuangan pemerintah kota Batam yang

dapat dilihat dari ringkasan perubahan APBD kota Batam, Tingkat perubahan dari retribusi daerah sangat tinggi dibandingkan dengan target awal yang direncanakan dalam retribusi daerah, sedangkan tingkat perubahan pajak daerah sangat rendah dibandingkan dengan target awal dalam perencanaan pajak daerah. Ini bisa dilihat pada ringkasan perubahan APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan APBD.

Permasalahan utama atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perubahan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan alokasi pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak bersamaan waktunya dengan jadwal penyusunan RAPBD kota Batam.
2. Tidak tercapainya rencana penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi kepri serta adanya aturan yang berasal dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Adanya aturan pusat yang berkaitan dengan kewenangan daerah.
4. Adanya peraturan daerah yang dapat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan daerah.
5. Konsistensi kinerja SKPD penghasil dalam memenuhi rencana target penerimaan.

Berdasarkan realisasi yang diperoleh dari data BPPRD kota Batam tahun 2018 berkaitan dengan target yang dicapai pemerintah daerah, pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah sebesar Rp 1.235.027.230.923,76, tidak sesuai

dengan tingkat realisasi yang lebih kecil sebesar Rp 1.084.640.559.852,99 dibandingkan dengan anggaran berdasarkan dari laporan keuangan yang tercantum dalam pendapatan asli daerah kota Batam, hal ini disebabkan tidak tersalurkannya seluruh dana yang ada dari pemerintah dan dikarenakan oleh faktor-faktor lain dari luar yang mempengaruhi tingkat realisasi anggaran tersebut.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraeni dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa:

1. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut data variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Batam pada tahun 2013-2018.

**Tabel 1. 1** Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2014	Rp 779.944.837.450,53
2015	Rp 836.713.858.341,88
2016	Rp 881.268.969.156,50
2017	Rp 974.124.203.684,08
2018	Rp 1.084.640.559.852,99

**Sumber :** Data dari BPPRD

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah di kota Batam setiap tahunnya mengalami perubahan, yaitu pada tahun pada tahun 2014 pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp 799.944.837.450,53. Lalu di tahun 2015 pendapatan asli daerah meningkat menjadi sebesar Rp 836.7132.858.341,88. Di tahun 2016 pendapatan asli daerah tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 881.268.969.156,50. Tahun 2017 pendapatan asli daerah masih tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 974.124.203.684,08. Dilanjutkan dengan tahun selanjutnya, yaitu tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 1.084.640.559.852,99. Pendapatan asli daerah di tahun tersebut mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini timbul karena pendapatan asli daerah di kota Batam diakibatkan oleh meningkatnya pajak daerah dan juga retribusi daerah di kota Batam.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Maka penulis tertarik untuk menarik judul tentang “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan asli daerah :

1. Adanya perbedaan antara target dan realisasi terhadap pajak daerah dan

retribusi daerah yang ada di Kota Batam.

2. Adanya target dari pajak daerah yang lebih besar atau lebih kecil dari tingkat realisasi pajak daerah, sehingga PAD berkurang.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk menyederhanakan masalah sehingga masalahnya tidak terlalu besar dan tidak menyimpang dari tema, penulis hanya fokus pada data realisasi APBD Kota Batam 2014-2018 pada pajak daerah dan retribusi daerah.

### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di kota Batam?
2. Bagaimanakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di kota Batam?
3. Bagaimanakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan PAD di kota Batam.

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap peningkatan PAD di kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penulis dan pembaca pengetahuan ilmiah dan wawasan tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual yang akan berguna untuk penelitian serupa dan akademi lain, khususnya di Universitas Putera Batam.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu untuk lebih memahami bidang akuntansi, terutama pajak daerah dan retribusi daerah, yang telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kota Batam. Selain itu diharapkan

menjadi panutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatasi masalah penerimaan daerah.

### 3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Pajak Daerah**

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang disebut pajak daerah (selanjutnya disebut pajak), merupakan manfaat langsung yang dibebankan kepada perorangan atau organisasi. Kontribusi wajib untuk masyarakat kepada daerah yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.

Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dikumpulkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaannya (Darise, 2009)

3. Tidak ada jasa timbal balik dari negara yang dapat disebutkan secara langsung. Tidak dapat dibuktikan bahwa ada pertentangan dari pemerintah dalam membayar pajak

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas (Darise, 2009).

#### **2.1.1.1. Fungsi Pajak Daerah**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Memang, pajak adalah sumber pendapatan negara untuk menutupi semua biaya, termasuk biaya pembangunan.

Dari sudut pandang pengumpulan pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penganggaran (Budgetair)

Fungsi ini terletak di sektor publik dan pajak di sini adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai perbendaharaan negara/daerah tepat waktu untuk menutupi pengeluaran pemerintah pusat/daerah.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan negara/daerah, dan konsep ini paling sering digunakan di sektor swasta (Darise, 2009).

#### **1.1.1.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah untuk wilayah administratif provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000, 11 jenis pajak daerah ditentukan sebagai berikut :

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;

2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
- g. Pajak parkir (Siahaan, 2016).

### **1.1.1.3. Cara Perhitungan Pajak Daerah**

Jumlah pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah pengenaan pajak. Metode perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah dan juga berfungsi sebagai dasar untuk semua jenis perhitungan pajak pusat.

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak    Rumus 2. 1 **Pajak Daerah**

**Sumber:** (M. P. Siahaan, 2010)

### **2.1.2. Retribusi Daerah**

Seperti halnya pajak daerah, retribusi harus menjadi salah satu sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat (26) UU No. 34 tahun 2000, "*Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu*

*yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”*

Berdasarkan ketentuan ini, retribusi adalah pemasukan yang menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk memenuhi kepentingan masyarakat baik individu maupun badan dengan kewajiban untuk memberikan alternatif dalam bentuk uang dalam bentuk uang sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh upaya pemerintah daerah (Putra, 2018).

Retribusi dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum adalah sumbangan untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi retribusi layanan kesehatan, retribusi layanan kebersihan/persampahan, retribusi pengembalian pencetakan kartu penduduk dan akte catatan sipil, dan lain-lain.
2. Retribusi jasa usaha juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Oleh karena itu retribusi untuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip komersial. Retribusi jasa usaha termasuk retribusi untuk penggunaan kekayaan daerah, retribusi pasar atau grosir, dan retribusi yang dibebankan kepada pelanggan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin kepada seseorang atau entitas untuk tujuan pengembangan, pengaturan, manajemen dan pengawasan untuk melindungi penggunaan ruang, sumber daya alam ,

fasilitas, infrastruktur atau penggunaan fasilitas tertentu. Retribusi untuk kegiatan tertentu pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan umum dan lingkungan. Beberapa jenis retribusi perizinan tertentu termasuk retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman keras, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek (Putra, 2018).

Namun, berdasarkan PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis biaya pengguna lain sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Jenis retribusi lain, seperti penghasilan negara bukan pajak yang diserahkan kepada daerah. Ketentuan-ketentuan ini memungkinkan daerah untuk mengeluarkan berbagai jenis retribusi pengguna yang pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat karena mengganggu iklim investasi dan memberi tekanan pada para pelaku usaha.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat (64), *“Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Putra, 2018).”*

#### **2.1.2.1. Cara Perhitungan Retribusi Terhutang**

Jumlah retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan layanan dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi terutang= Tarif retribusi x Tingkat penggunaan jasa

## **Rumus 2. 2** Retribusi Daerah

**Sumber:** (Siahaan, 2016)

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah yang harus terus ditingkatkan sebagai sumber pendapatan daerah itu sendiri agar dapat memikul beberapa beban dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang meningkat setiap tahun.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya didasarkan pada UU No. 34 tahun 2000 tentang UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tentang retribusi daerah (Darise, 2009).

### **2.1.3.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan membuat perkembangan di semua bidang, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah bahwa *“Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Adanya hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangga sendiri ditentukan oleh sumber pendapatan daerah yang efisien dan efektif, khususnya pendapatan asli daerah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Putra, 2018).

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dihasilkan dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak negara yang dibiarkan di daerah yang diberlakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Retribusi daerah, yaitu pungutan

daerah yang dibayarkan untuk penggunaan layanan atau untuk layanan yang terkait dengan pekerjaan, bisnis atau milik daerah untuk perorangan atau badan yang tertarik pada layanan yang disediakan oleh daerah. Perusahaan daerah adalah salah satu komponen yang harus berkontribusi pada keuntungan, tetapi sifat utama perusahaan daerah bukanlah fokus pada keuntungan, tetapi untuk menyediakan layanan dan mengatur kepentingan publik (Putra, 2018).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Kusuma & Wirawati, 2013)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2.	(Usman, 2015)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung secara parsial.
3.	(Putri & Rahayu, 2015)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Dalam penelitian ini hasil uji F menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan

		Anggaran 2010-2014)		berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
4.	(Sangatta, 2012)	The Effect Of Local Tax Towards Local Revenue In Malang District	The Effect Of Local Tax, Local Revenue	The F (simultaneous test) used This suggests there is a significant effect of the independent variable on the dependent variable and Test t (partial testing) used the dependent variable can explain the independent variable, and there is a significant effect between the four variables tested.
5.	(Nasir, Basri, Kamaliah, & Muda, 2017)	Effectiveness Of Potential Tax Region As The Real Local Revenue Sources In Riau Coastal Area	Effectiveness of Potential Tax Region, The Real Local Revenue	According to the analysis of the effectiveness of Local Taxes from 2011 to 2016 the effectiveness of Local Tax fluctuates from year to year. For hotel taxes, restaurant taxes and street lighting taxes and Non PLN Street Lighting almost every year experience realization that exceeds the

				meaningful targets for these four types of taxes is very effective and in the Fluctuation Local taxes from year to year are due to the addition of the type of taxes.
--	--	--	--	---

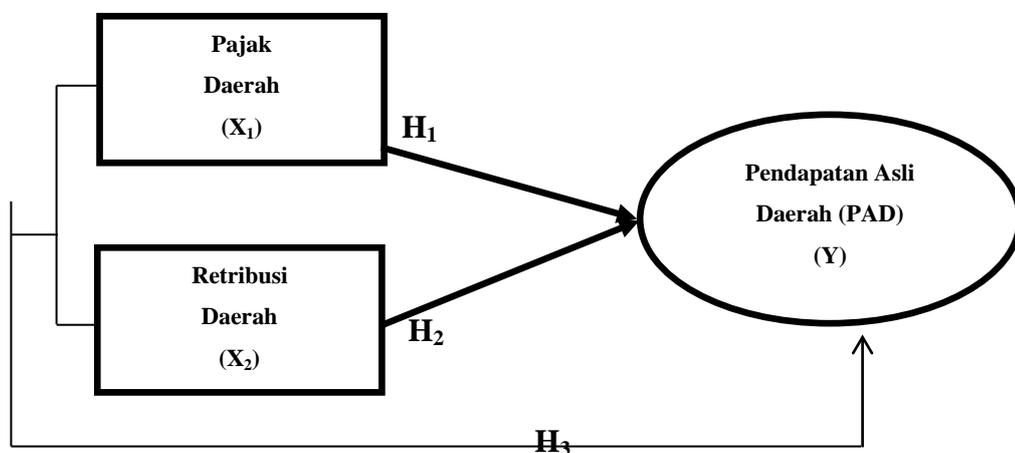
**Sumber:** Jurnal dan skripsi

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari proposal judul yaitu pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Batam.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang akan dijadikan penulis sebagai acuan penelitian :



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan .

H<sub>1</sub> : Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H<sub>2</sub> : Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H<sub>3</sub> : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

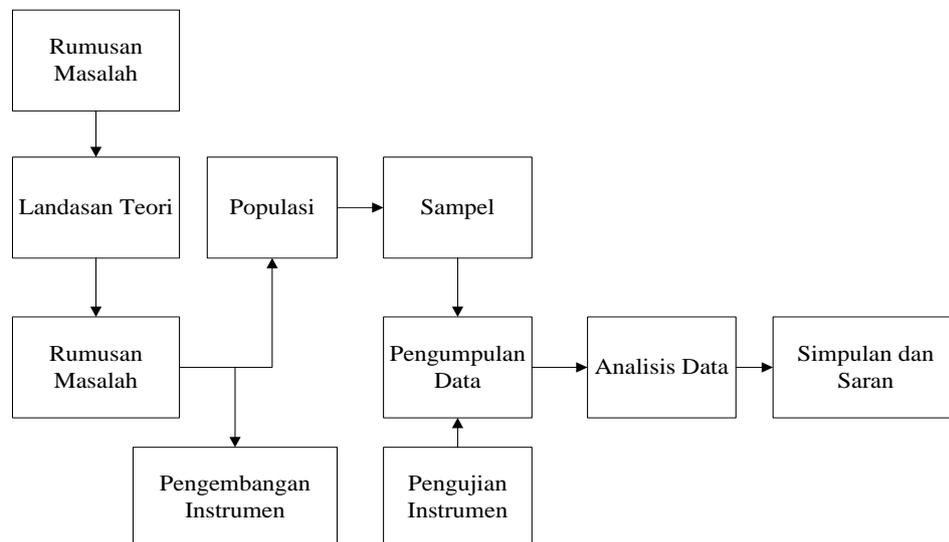
#### **3.1. Desain Penelitian**

Kerangka kerja untuk tindakan atau kerangka fikir, mengatur ide-ide yang tertata, terarah, dan kontekstual yang terkait dengan maksud dan tujuan. Singkatnya, metode ini adalah sistem. Sebagai suatu sistem, metode ini adalah seperangkat metode yang membentuk unit. Unsur-unsur dari metode ini adalah pengetahuan intelektual, konsep, metode pendekatan (*approach*) dan desain basis data (*database*). Informasi intelektual tentang nalar, tanggap rasa (*sensation*), penyerapan (*sensation*), pengalaman, ilmu pengetahuan. Konsep ini adalah hasil dari proses intelektual dalam bentuk peristiwa imajinatif yang memperluas atau memperkaya tangkapan untuk memungkinkan pembentukan ide-ide baru yang dapat lebih akurat menganalisis masalah.

Penelitian (*research*) adalah kegiatan mengkaji (*study*) yang teliti dan teratur di bidang ilmiah sesuai dengan aturan tertentu. Prinsip yang dianut adalah metode. Belajar adalah upaya untuk memperoleh atau menambah pengetahuan. Penelitian dilakukan untuk memperdalam dan meningkatkan pemahaman tentang sesuatu(Kuswanto,2012).

Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Sehingga metode penelitian memiliki pengertian,

suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Kuswanto, 2010).



**Gambar 3. 1** Desain Penelitian

### 3.2. Operasional Variabel

Pengertian variabel penelitian adalah sebagai berikut :

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2010).

#### 3.2.1. Variabel Independen (Variabel bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah adalah variabel independen untuk penelitian ini (Sugiyono, 2010).

### **3.2.2. Variable dependen (Variabel terikat)**

Variabel dependen adalah variabel yang ditugaskan atau disebabkan oleh variabel independen. Pendapatan asli daerah adalah variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah (Sugiyono, 2010).

### **3.3. Populasi dan sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh para peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulan. Karena itu, populasinya bukan hanya manusia, tetapi juga benda dan benda alam lainnya. Populasi juga mencakup semua properti / karakteristik yang dimiliki subjek atau subjek, serta jumlah yang ada dalam subjek / subjek (Sugiyono, 2016).

Populasi penelitian ini terdiri dari semua data pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Batam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series (runtut waktu) dari Januari hingga Desember selama tahun 2014 hingga 2018 dan termasuk data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah kota Batam.

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Ketika populasinya besar, para peneliti tidak dapat mempelajari seluruh populasi, termasuk dana, tenaga dan waktu yang tersedia. Peneliti dapat menggunakan

sampel yang diambil dari populasi ini. Apa yang dipelajari dari sampel, temuannya dapat diterapkan pada populasi. Untuk alasan ini, sampel yang diambil dari suatu populasi harus benar-benar mewakili populasi yang ada (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampelnya adalah data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah kota Batam selama tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka. Berdasarkan metode perolehan data, penelitian ini menggunakan data sekunder. Dengan kata lain, data diproses oleh pihak lain dan sudah dipublikasi diterbitkan oleh pihak tertentu (Kuswanto, 2012). Adapun cara dalam mendapatkan data dalam penelitian ini dengan cara :

1. Metode Observasi

Mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPRD).

2. Metode Pustaka

Membaca dan pelajari buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu, atau informasi pendapatan asli daerah (PAD), serta faktor-faktor lain yang menjadi dasar penelitian.

### **3.4.1. Alat Pengumpulan Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk angka, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yakni, mendatangi langsung ke instansi terkait untuk mencatat dan menyalin data yang diperlukan untuk penelitian ini.

### **3.5. Analisa Data**

Analisis data adalah kegiatan yang menghitung data sehingga dapat disajikan secara sistematis. Analisis data untuk studi kuantitatif dapat dihitung menggunakan rumus statistik atau dilakukan secara manual menggunakan program bantuan statistik seperti SPSS, Minitab, XL-Stat, S, Plus (Priyatno, 2010). Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis untuk analisis variabel independen (Sugiyono, 2015).

#### **3.5.1. Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015).

#### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji regresi sederhana dapat dilakukan setelah menguji asumsi klasik untuk menentukan apakah data yang digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak, yang terdiri sebagai berikut :

### 3.5.2.1. Uji Normalitas Data

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah nilai residu (perbedaan yang ada) adalah normal atau tidak normal. Tujuannya adalah untuk menguji apakah variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik ketika distribusi data normal atau mendekati normal.

Analisis grafik (*Normal P-P plot*) dan *One Sample Kolmogorov Smirnov* adalah dua metode yang biasa digunakan untuk uji normalitas residual. Kurva P-P plot biasanya dapat dideteksi dengan memeriksa penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan memeriksa residu. Jika penyebaran terjadi, model regresi dideteksi dengan distribusi normal. Untuk metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, metode deteksi terdiri dalam memeriksa nilai signifikansi residu, jika melebihi 0,05 maka residu terdistribusi secara normal (Priyatno, 2013).

### 3.5.2.2. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah suatu kondisi di mana hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna terjadi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang tepat tidak adanya masalah multikolonieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas, adalah dengan memeriksa tolerance dan hasilnya VIF hasil regresi linier. Jika tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, multikolonieritas tidak terjadi.

### 3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu kondisi di mana residu dari satu pengamatan dan korelasi pengamatan lain diatur sesuai dengan runtun waktu. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak menimbulkan masalah autokorelasi. Ketika autokorelasi terjadi, persamaan menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai diprediksi. Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan periode  $t$  (berada) dan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya), masalah autokorelasi baru muncul (Sunyoto, 2011).

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah  $-2$  ( $DW < -2$ ).
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara  $-2$  dan  $+2$  atau  $-2 \leq DW \leq +2$ .
3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas  $+2$  atau  $DW > +2$  (Sunyoto, 2011).

### 3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dengan varian residual yang tidak sama untuk semua pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Beberapa metode dapat digunakan untuk menguji heterokedastisitas adalah Spearman rho testing, glejser testing, dan grafik regresi (Priyatno, 2013).

Uji Spearman rho digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya variabilitas dengan menganalisis korelasi Spearman antara residual dan masing-masing

variabel independen. Tidak ada heterokedastisitas jika nilai signifikansi antara variabel independen dan residual lebih besar dari 0,05 (Priyatno, 2013).

Uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai mutlaknya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Priyatno, 2013).

Uji heteroskedastisitas dilakukan secara grafik, yaitu dengan memeriksa model titik-titik dalam scatterplot regresi. Jika titik-titik tidak terdistribusi secara jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada masalah heterokedastisitas (Priyatno, 2013).

### **3.5.3. Uji Pengaruh**

#### **3.5.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Perbedaan dari regresi linier sederhana adalah jumlah variabel independen. Regresi linier sederhana menggunakan variabel independen tunggal, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen yang termasuk dalam model regresi.

Analisis ini memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun, dan untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen terkait positif atau negatif (Priyatno, 2013).

Adapun persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_n + e \quad \textbf{Rumus 3.1} \text{ Regresi Linier Berganda}$$

Dimana :

Y = Variabel dependent pendapatan asli daerah (PAD)

X<sub>1</sub> = Variabel independent penerimaan Pajak daerah

X<sub>2</sub> = Variabel independent penerimaan Retribusi daerah

α = Konstanta

e = error

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub> = Koefisien regresi

### 3.5.4. Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen secara parsial atau untuk setiap variabel. Setelah menentukan formula hipotesis, tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05. *Output Coefficien* menggambarkan uji-t yang merupakan uji parsial, tetapi artinya mengukur tingkat signifikansi uji-t, tetapi jika signifikansi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara parsial variabel independen dari variabel dependen (Priyatno, 2012). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel:

1. Apabila angka signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak.
2. Apabila angka signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.
3. Apabila t hitung < t tabel maka Ha ditolak.

4. Apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_a$  diterima

#### 3.5.4.2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memengaruhi variabel dependen secara bersamaan (Priyatno, 2016).

Hasil uji F dapat dilihat pada *output ANNOVA* dan hasil analisis regresi linear berganda diatas. Tahap-tahap untuk melakukan uji F, adalah :

##### 1. Merumuskan Hipotesis

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh antara investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a$  : ada pengaruh antara investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekenomi.

##### 2. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan menggunakan 0.05 ( $\alpha = 5\%$ )

##### 3. Kriteria pengujian

$H_0$  diterima bila  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel

$H_0$  ditolak bila  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel (Priyatno, 2016).

#### 3.5.4.3. Analisis Determinasi ( $R^2$ )

Analisis keputusan digunakan untuk menentukan presentasi pengaruh variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) pada variabel dependen ( $Y$ ). Koefisien ini menunjukkan sejauh mana variasi variabel independen yang digunakan dalam model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Karena  $R^2$  sama dengan 0, tidak ada sedikit pun indikasi kontribusi pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Atau, variasi dari variabel independen yang digunakan dalam model tidak memperhitungkan variasi kecil dari variabel dependen. Sebaliknya, ketika  $R^2$  sama dengan 1, rasio pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

### **3.5.5. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian**

#### **3.5.5.1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam, yang beralamatkan di Jalan. Raja Isa No. 17, Batam centre Kota Batam, Kepulauan Riau 29432.

#### **3.5.5.2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2019 hingga Agustus 2019, dengan 14 pertemuan bimbingan skripsi dan bimbingan pada jurnal penelitian dengan dosen pembimbing skripsi. Jadwal penelitian ini dimulai pada tahap penelitian perpustakaan dan berakhir pada tahap penerbitan jurnal.

**Tabel 3. 1** Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan						
		Mar 2019	Apr 2019	Mei 2019	Jun 2019	Jul 2019	Agst 2019	Sept 2019
1.	Studi ke perpustakaan							
2.	Perumusan judul							
3.	Pengajuan proposal penelitian							
4.	Pengambilan data							
5.	Pengolahan data							
6.	Penyusunan laporan skripsi							
7.	Pengujian skripsi							
8.	Penyerahan skripsi							
9.	Penerbitan jurnal							